

**ANALISI KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH
(Studi Kasus di wilayah Kabupaten Lombok Barat)**

Beverly Evangelista
Universitas Teknologi Mataram
beverlyevangelista48@gmail.com

ABSTRAK

Peningkatan PAD Kabupaten Lombok barat tidak lepas dari peran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sehingga sangat penting untuk mengkaji kinerja lembaga tersebut agar PAD Lombok Barat dapat meningkat dengan XXoptimal. Dari tolak ukur penilaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Barat dalam peningkatan PAD, indikator produktivitas didapatkan hasil sumber dana dari APBD yang masih terbatas, tingkat pendidikan sumber daya manusia mayoritas sudah memenuhi syarat, dan sumber daya waktu dalam pelaporan dan pendataan yang optimal. Indikator kualitas pelayanan, Indikator responsivitas ditunjukkan dengan menanggapi keluhan masyarakat dan memberikan detail informasi yang diminta. Responsibilitas BPKAD sudah sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang ada. Sehingga dapat di simpulkan bahwa kinerja BPKAD Kabupaten Lombok Barat dalam peningkatan PAD menunjukkan hasil yang baik.

Kata kunci : Peningkatan PAD, Kinerja, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

ABSTRACT

The increase in the PAD of West Lombok Regency cannot be separated from the role of the Regional Financial and Asset Management Agency so it is very important to review the performance of the institution so that the PAD of West Lombok can increase optimally. From the benchmarks for assessing the performance of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of West Lombok Regency in increasing PAD, productivity indicators are obtained from the results of funding sources from the APBD which are still limited, the education level of the majority of human resources has met the requirements, and time resources in reporting and optimal data collection. Service quality indicators Responsiveness indicators are shown by responding to public complaints and providing detailed information requested. BPKAD's responsibility is in accordance with existing procedures and policies. So it can be concluded that the performance of BPKAD in West Lombok Regency in increasing PAD shows good results.

Key words : Increase in PAD, Performance, Financial and Asset Management Area

A. Pendahuluan

Untuk mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah yang lebih efektif dan efisien khususnya diwilayah Lombok Barat, maka dibentuklah suatu lembaga yakni Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Barat.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142).

Selanjutnya tugas dan Fungsi BPKAD Kabupaten Lombok Barat ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pembentukan BPKAD ini sebagai lembaga teknis daerah dihatatkan untuk memperkuat organisasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Lombok Barat.

Sebelumnya pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat, sedangkan pengelolaan aset daerah dilaksanakan oleh Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat. Perubahan organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Kantor Aset Daerah ini merupakan langkah strategis dalam ikhtiar mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik karena sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel. Kebijakan ini sejalan dengan paradigma pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi satu kesatuan, dimana uang dan aset harus dapat disajikan dalam neraca dan laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan kebijakan daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Berdasarkan tugas dan fungsi-fungsi yang telah ditetapkan, maka BPKAD mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan penerimaan atau pendapatan daerah. Keberhasilan BPKAD dalam peningkatan pendapat asli daerah akan banyak ditentukan oleh kinerja BPKAD dalam menjalankan tugas dan fungsi-fungsi tersebut. Maka peranan BPKAD perlu ditingkatkan, bukan sekedar pencapaian target-target yang telah ditetapkan, tetapi juga harus mampu menyesuaikan dan mengantisipasi berbagai perubahan yang ada, baik perubahan eksternal, seperti faktor politik yakni perubahan

kebijakan dan sebagainya, faktor ekonomi yakni perubahan perekonomian Indonesia yang naik turun, faktor sosial seperti kesadaran masyarakat terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Dilain pihak, BPKAD juga harus mampu melihat gejala internal, seperti gejala sikap dan perilaku orang-orang di dalam organisasi (misalkan kepemimpinan). sumber daya manusia, baik secara individu maupun kelompok. Setiap individu di dalam organisasi dituntut memiliki wawasan yang luas, sekaligus dapat memberikan visi kepada PEMKAB Lombok Barat di bidang pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dan struktur organisasi sebagai bagian internal yang saling berkaitan dengan fungsi dalam aktivitas organisasi. Bila tidak, maka organisasi ini tidak efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan mempunyai akibat terhadap prospek otonomi daerah itu sendiri, sebagaimana yang dikehendaki oleh UU No. 32 Tahun 2004.

B. Kinerja BPKAD Kabupaten Lombok Barat Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil dari sebuah kinerja sangat penting untuk diketahui di dalam pelaksanaan suatu organisasi atau instansi pemerintah untuk menetapkan apakah kegiatan yang sudah dibuat dapat terselesaikan dengan baik atau tidak. Adapun indikator yang digunakan untuk mengetahui kinerja BPKAD Kabupaten Lombok Barat dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas dengan adanya beberapa indikator diatas maka diharapkan

terlaksananya hasil kinerja BPKAD dalam peningkatan PAD.

1. Produktivitas

Produktivitas merupakan salah satu faktor yang penting dalam mempengaruhi proses kemajuan dan kemunduran suatu organisasi. Berarti peningkatan produktivitas akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan dan mutu. Oleh sebab itu perlu dilakukan suatu pengukuran produktivitas dari organisasi atau instansi pemerintah untuk mengetahui tolak ukur produktivitas yang telah dicapai yang merupakan dasar dari perencanaan bagi peningkatan produktivitas di masa yang akan datang.

waktu dan sumber daya yang dimiliki untuk perbaikan Produktivitas yang terdapat pada BPKAD Kabupaten Lombok Barat adalah tersedianya input dan output sebagai berikut :

Dana merupakan input dalam pelaksanaan pelayanan BPKAD Lombok Barat. Dana merupakan salah satu hal yang penting dalam implementasi kegiatan dan program karena dalam pelaksanaan kegiatan dan program tidak akan berjalan baik tanpa adanya dana dan modal yang tersedia. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. Mahyudin, M.SI selaku kepala BPKAD Kabupaten Lombok Barat menyebutkan bahwa setiap tahunnya BPKAD mendapat dana dari pemerintah Kabupaten Lombok Barat, dan dana tersebut merupakan bagian dari APBD Kabupaten Lombok Barat yang kemudian dibagi ke tiap-tiap lembaga maupun dinas dengan proporsi sesuai dengan kebutuhan dinas masing-masing,

dengan cara pengajuan dana anggaran tiap tahun, dan dana tersebut biasanya digunakan sesuai kebutuhan yang paling mendesak.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Selama ini kinerja BPKAD dalam peningkatan PAD masih mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Hal tersebut terjadi karena terdapat keterbatasan dana sehingga pelaksanaan belum maksimal dilakukan. Sumber dana tersebut juga digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana, jaringan komputer dan komunikasi berbasis data base dan tentunya pengadaan internal selain untuk pemeliharaan.

Sementara itu, input yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan, program, atau kebijakan diperlukan selain sumber dana adalah sumber daya manusia yang unggul dan handal. Adanya sumber daya manusia yang unggul dan handal di BPKAD Kabupaten Lombok Barat dengan latar belakang jenjang pendidikan tinggi sangat mendukung kegiatan BPKAD dalam menjalankan tugas secara professional dan akuntabel. Selain sumber daya manusia dan dana input yang dimiliki oleh BPKAD Kabupaten Lombok Barat adalah sumber daya waktu, adanya waktu akan memperlancar didalam proses pendataan, penetapan wajib pajak dan penyusunan target pajak. Waktu juga digunakan untuk pelaporan kegiatan setiap 1 bulan sekali, triwulan, semesteran dan tahunan. Hasil (*output*) dari kegiatan tersebut adalah terjadi peningkatan PAD dari tahun ke tahun. Peningkatan PAD

Kabupaten Lombok Barat selama periode 5 tahun tersebut tidak terlepas dari adanya kebijakan yang dilaksanakan BPKAD Kabupaten Lombok Barat, yaitu kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah. Kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentuk proyek ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah terhadap potensi pajak dan retribusi daerah. Pendanaan proyek ini diambil dari APBD yang dialokasikan kepada BPKAD Kabupaten Lombok Barat sebagai pelaksana proyek tersebut.

Ekstensifikasi pendapatan daerah yang dilakukan adalah dengan memperluas objek pajak dengan memperbanyak tempat pembayaran pajak. Bisa melalui bank, kantor pos, serta perbaikan sistem komputerisasi online. Sedangkan intensifikasi pendapatan daerah dengan mengintensifkan pemungutan pajak yaitu salah satunya dengan sistem “jemput bola” dimana terdapat petugas dari BPKAD yang datang ketempat wajib pajak untuk memungut pajak, sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke BPKAD untuk menyettor sendiri.

2. Kualitas Pelayanan

Di Indonesia, konsepsi pelayanan administratif pemerintah sering kali dipergunakan secara bersama-sama sebagai sinonim dari konsepsi pelayanan perizinan dan pelayanan umum, serta pelayanan publik. Keempat hal tersebut dipakai sebagai terjemahan dari public service. Kualitas layanan yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Lombok Barat dalam peningkatan PAD yakni melalui transformasi atau penyampaian informasi kepada masyarakat, pencatatan data serta konsistensi

penyampaian informasi kepada masyarakat.

Kualitas layanan yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Lombok Barat dalam peningkatan PAD melalui transformasi atau penyampaian informasi kepada masyarakat, pendataan kepesertaan pajak, serta konsistensi penyampaian informasi kepada masyarakat.

Kualitas layanan yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Lombok Barat dalam peningkatan PAD menunjukkan proses penyampaian pesan dari sumber kepada penerima. Oleh karena itu, kualitas layanan akan berhasil dengan baik apabila informasi yang disampaikan dapat dimengerti oleh penerima data yaitu masyarakat.

Layanan publik, merupakan hak masyarakat yang pada dasarnya mengandung prinsip : kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan. Orientasi pada pelayanan menunjuk pada seberapa banyak energi birokrasi dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pelayanan publik. Adanya Standar operasional prosedur (SOP) didalam suatu kegiatan merupakan suatu indikator dari kualitas layanan kepada masyarakat. SOP merupakan pedoman kerja pada setiap instansi atau organisasi dalam menjalankan kegiatannya.

Dari hasil pengamatan penulis, pengelolaan PAD oleh BPKAD Kabupaten Lombok Barat dalam memberikan informasi pelayanan

kepada masyarakat sudah sesuai SOP mengenai prosedur pendataan wajib pajak dan kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan sudah baik. Prosedur yang diterapkan oleh BPKAD Kabupaten Lombok Barat dalam peningkatan PAD mengacu pada wajib pajak, retribusi pajak daerah dan PAD yang lain yang sah sesuai undang-undang.

Sarana dan prasarana yang ada di BPKAD Kabupaten Lombok Barat khususnya bagian pendapatan sudah seimbang karena tiap pegawai sudah mempunyai 1 orang pembantu teknologi (komputer) dan mempunyai kedisiplinan yang baik, sehingga dengan adanya kedisiplinan kerja maka sikap dalam penyampaian informasi kepada masyarakat yang membutuhkan terlihat baik. Banyaknya komputer sebagai infrastruktur pelayanan BPKAD Kabupaten Lombok Barat maka akan memudahkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai PAD, sehingga dapat menciptakan kepuasan terhadap masyarakat yang mendapatkan pelayanan.

3. Responsivitas

Dalam penelitian ini responsivitas atau daya tanggap berarti kemampuan dari BPKAD Kabupaten Lombok Barat dalam merespon dan menanggapi apa yang menjadi permasalahan dan keinginan dari wajib pajak, dalam hal ini responsivitas ditunjukkan dengan seberapa besar daya tanggap pegawai BPKAD Kabupaten Lombok Barat dalam menyikapi keluhan dari masyarakat.

BPKAD Kabupaten Lombok Barat sebagai instansi pemerintahan dalam memberikan pelayanan tidak luput dari keluhan dari masyarakat. Hal ini terjadi karena karakteristik dan keinginan dari masyarakat yang berbeda-beda. Masyarakat sebagai pelanggan akan merasa senang terhadap sikap petugas atau pegawai di BPKAD Kabupaten Lombok Barat yang serius menangani setiap keluhan yang disampaikan serta bersama-sama mencari jalan keluar. Pegawai dalam situasi seperti ini harus mempunyai kemauan untuk memecahkan masalah dan kendala secara cermat, tepat dan bijaksana.

Berikut adalah pendapat Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Barat terkait keluhan dari masyarakat:

“...menurut saya keluhan masyarakat itu merupakan ungkapan penilaian akan kualitas pelayanan yang kami berikan. Apabila mereka kadang kurang puas ya wajar saja kalo ada yang mengeluh, tinggal bagaimana tindak lanjut kami menyikapinya. Sejauh ini pernah ada beberapa orang yang mengeluh misalkan waktu pelayanan yang lama, kemudian pegawai yang kurang ramah. Kalo masalah waktu pelayanan kami sudah berusaha menyikapi dengan sistem standar konsumen dan untuk pegawai yang kurang ramah kami berikan pengertian dan nasehat untuk ramah terhadap setiap wajib pajak yang datang. ...”

Dari pendapat tersebut menunjukkan bahwa pegawai BPKAD Kabupaten Lombok Barat selalu berusaha menanggapi

apa yang menjadi keluhan masyarakat.

Keluhan memang harus ditanggapi, dan untuk menanggapi keluhan dalam pelayanan harus ada sikap tertentu dari aparat yang seharusnya tidak merugikan wajib pajak.

Selanjutnya berkaitan dengan tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diterima oleh wajib pajak, dapat dikatakan pelayanan yang diberikan oleh aparat BPKAD dapat dikatakan cukup memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari sikap para petugas loket pendaftaran dan penyetoran dalam menghadapi wajib pajak. Petugas loket cukup cekatan, ramah dan sopan dalam memberikan pelayanan. Untuk menjaga kepuasan wajib pajak, aparat BPKAD memberikan kelonggaran waktu pelayanan yang seharusnya sudah tutup, tetapi pelayanan tetap dilanjutkan, karena mereka sudah terlanjur antri. Mereka tetap memberikan pelayanan sampai selesai.

4. Responsibilitas

Responsibilitas dalam penelitian mengenai kinerja BPKAD Kabupaten Lombok Barat merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik yang dilakukan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian mengenai kinerja BPKAD Kabupaten Lombok Barat dalam peningkatan PAD responsibilitas bisa dilihat dari apakah pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan PAD itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan dari

pemerintahan Kabupaten Lombok Barat. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

Dalam pelaksanaan kegiatan terkait peningkatan PAD, BPKAD Kabupaten Lombok Barat sudah melaksanakan sesuai dengan kebijakan atau prosedur yang ada. Sesuai dengan prosedur seperti apa yang disebutkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, Bab IV mengenai keuangan daerah, paragraf dua, pendapatan, belanja dan pembiayaan pasal 157 menyebutkan bahwa, sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

“pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut Pendapatan Asli Daerah, yaitu :

1. Hasil pajak daerah;
2. Hasil retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain lain PAD yang sah ;..”

Yang dimaksud dalam undang undang tersebut bahwa PAD merupakan gabungan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain-lain yang sah, kemudian diserahkan ke seksi PAD bidang Pendapatan. Seperti yang disebutkan oleh kepala BPKAD Kabupaten Lombok Barat bahwa pihak BPKAD Kabupaten Lombok Barat selalu berusaha menjalankan sesuatu sesuai prosedur yang ada yakni sesuai tupoksi masing-masing.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dalam upaya peningkatan PAD sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Hal ini dilakukan karena adanya

tujuan berupa peningkatan PAD dan menyangkut dari berbagai sumber masyarakat. Dalam hal ini BPKAD Kabupaten Lombok Barat akan bertanggung jawab terhadap atasan yakni pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Lombok Barat.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa jauh penyelenggaraan pelayanan publik dapat dipertanggungjawabkan secara langsung atau tidak kepada publik, maupun kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas dapat disimpulkan sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periode. Akuntabilitas BPKAD Kabupaten Lombok Barat sebagai pelaksana pengelola pendapatan asli daerah. Sebagai instansi pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat, BPKAD merupakan salah satu instansi pemerintahan yang diberikan wewenang dan tanggung jawab dalam hal perencanaan, pengawas dan pengendali pendapatan asli daerah . Dengan demikian jelas terlihat bahwa BPKAD Kabupaten Lombok Barat merupakan sebuah instansi vertikal di bawah Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat. Pertanggungjawaban BPKAD Kabupaten Lombok Barat secara vertikal adalah kepala daerah

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yaitu kepada Bupati Kabupaten Lombok Barat. Jelas bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan BPKAD Kabupaten Lombok Barat dalam peningkatan PAD adalah kepada daerah yaitu kepada Bupati Kabupaten Lombok Barat. Hal itu dikarenakan BPKAD Kabupaten Lombok Barat merupakan bagian dari SKPD Kabupaten Lombok Barat sehingga secara otomatis pertanggungjawabannya akan ditujukan kepada bupati selaku kepala daerah.

Dalam pelaksanaannya, pihak BPKAD Kabupaten Lombok Barat sudah bertanggung jawab penuh kepada Bupati Kabupaten Lombok Barat dan masyarakat Kabupaten Lombok Barat. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai hal yang dilakukan dalam rangka peningkatan PAD agar lebih optimal lagi. Sedangkan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban, pihak BPKAD Kabupaten Lombok Barat menyatakan tidak menemui hambatan.

Masyarakat sendiri juga berpendapat bahwa BPKAD Kabupaten Lombok Barat sudah bertanggung jawab dengan semua tugasnya, seperti yang disampaikan ibu Ratna yang sedang membayar pajak di BPKAD Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut:

“...Kalau menurut saya, dalam melaksanakan tugasnya pegawai-pegawainya sudah bertanggung jawab, pegawai juga selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam pelayanan pembayaran pajak, contohnya semakin ke sini selalu ada perbaikan fasilitas ...”

Hal senada juga diungkapkan oleh pegawai Kepala Bidang Pendapatan berikut ini :

“...pihak kami selalu berusaha bertanggung jawab dengan baik terhadap semua kegiatan terkait PAD. Dalam semua kegiatan kami tidak asal-asalan, kami selalu melakukan dengan berpedoman pada aturan, misalnya Perda dan juklak. Dulu pedoman kami adalah UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah , namun sejak tahun 2004 ada beberapa aturann yang diubah sesuai dengan UU no 32 tahun 2004. Jadi selama kita menjalankan tugas dengan baik dan tidak melenceng dari aturan-aturan sudah merupakan wujud pertanggungjawaban kita kepada publik...”

Dari pernyataan tersebut, pegawai BPKAD Kabupaten Lombok Barat sudah bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Wujud pertanggungjawabannya adalah dengan berusaha menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan berusaha mengemban visi dan misi dengan baik serta berusaha memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat wajib pajak.

Mengingat tugas besar yang diberikan kepada BPKAD Kabupaten Lombok Barat sebagai satu-satunya instansi pemberi layanan dalam bidang pengelolaan PAD di Kabupaten Lombok Barat, untuk itulah pihak dari BPKAD diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban sebagai bukti pelaksanaan tugasnya dalam periode waktu tertentu. Mengenai laporan pertanggungjawaban di BPKAD Kabupaten Lombok Barat telah

dilaksanakan secara berkala. pertanggungjawaban keuangan PAD dilaporkan secara periode. Dengan adanya laporan pertanggungjawaban tersebut bisa diketahui apakah realisasi yang didapat sudah sesuai dengan target yang ditentukan. Secara umum diketahui bahwa akuntabilitas BPKAD khususnya dalam peningkatan PAD sudah cukup baik. Pihak BPKAD Kabupaten Lombok Barat telah melakukan mekanisme pertanggungjawaban, baik secara vertikal kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat maupun kepada masyarakat.

Dari indikator yang digunakan untuk mengetahui kinerja BPKAD Kabupaten Lombok Barat tersebut, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai BPKAD Kabupaten Lombok Barat tersebut dalam menjalankan tugasnya yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal meliputi :

1. Kepemimpinan

Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi. (Tangkilisan, 2005:180). Organisasi publik seperti BPKAD Kabupaten Lombok Barat masih bersifat hierarki sehingga membutuhkan sosok kepemimpinan yang handal yang bisa mengendalikan anggotanya agar bekerja sesuai standar dan tujuan organisasi. Tetapi kepemimpinan yang ada dalam BPKAD Kabupaten Lombok Barat mampu mengendalikan anggota organisasi agar dapat bekerja sesuai standar, hal ini dikarenakan dalam mencapai tujuan organisasi

kepemimpinan sudah sesuai prosedur. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Barat mengatakan bahwa :

“...pihak kami selalu berusaha menjalankan sesuatu sesuai prosedur yang ada tapi ya namanya juga orang kerja kan tidak selalu harus nurut aturan, apalagi untuk permasalahan yang sifatnya manusiawi. Misalnya saja tentang pelaporan yang telat dan masih dirapel, terkadang terpaksa dari BPKAD yang mendatangi...”

Berdasarkan pendapat diatas menunjukan bahwa kepemimpinan dalam BPKAD Kabupaten Lombok Barat cukup mampu untuk mengarahkan anggotanya untuk bekerja sesuai dengan prosedur yang ada, hal ini dilakukan karena adanya tuntutan untuk mengejar target yang telah ditetapkan.

2. Stuktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi. (Tangkilisan, 2005 : 180). Struktur organisasi yang ada di BPKAD Kabupaten Lombok Barat bersifat hirarkis, dimana terdapat tingkatan antara kepala dan staff. Berdasarkan struktur organisasi pegawai BPKAD Kabupaten Lombok Barat dibagi menjadi kepala Badan yang membawahi beberapa kepala bidang dan seterusnya.

Dari struktur organisasi yang ada di BPKAD Kabupaten Lombok Barat jelas sekali bahwa setiap pegawai mempunyai tugas dan fungsi tersendiri dan sifatnya hirarkis, sehingga semua pegawai mempunyai tanggung jawab secara vertikal terhadap atasan. Struktur organisasi ini mempunyai

pengaruh dalam evaluasi kinerja di BPKAD Kabupaten Lombok Barat karena dengan struktur organisasi yang terlalu hirarkis biasanya prosedur pelayanan berbelit-belit karena setiap keputusan berasal dari atasan.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia, yang berkaitan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal. (Tangkilisan, 2005:180). Sumber daya manusia adalah merupakan motor penggerak suatu organisasi dengan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas maka akan bergerak ke arah yang lebih baik. BPKAD Kabupaten Lombok Barat sebagai sebuah organisasi publik yang bertugas mengelola PAD memerlukan pegawai-pegawai yang berkualitas.

Kualitas sumber daya manusia BPKAD Kabupaten Lombok Barat ditunjukkan oleh banyaknya jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan-pelatihan seperti pembinaan teknis (bintek) seperti yang diungkapkan Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Barat berikut :

“Kalau berbicara tentang kualitas pegawai kami ya bisa dibilang kami telah berusaha untuk meningkatkan kualitas pegawai. Kalau dilihat dari pendidikan formal pegawai kami mayoritas bergelar sarjana bahkan magister oleh karena itu pegawai kami sudah sesuai dengan standart kualitas”

Faktor Eksternal meliputi :

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya beli untuk menggerakkan

sektor-sektor lainnya sebagai suatu sistem ekonomi yang lebih besar. (Tangkilisan, 2005:181).

Dalam Pendapatan Asli Daerah tidak terlepas dari faktor ekonomi yang mempengaruhi jumlah pendapatan yang termasuk dalam PAD misalnya pajak retribusi. Terutama sejak perekonomian Indonesia yang tidak stabil, hal ini seperti dikatakan oleh Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Barat berikut :

”...Keadaan perekonomian yang tidak stabil membuat beberapa usaha pailit dan akan berpengaruh terhadap setoran pajak sehingga berpengaruh pada PAD, Hal ini menjadi beban berat bagi pihak kami untuk bisa kerja keras dalam meningkatkan PAD...”

Selain itu diperkuat lagi oleh pendapat Bapak Haji Rasman salah satu pengusaha rumah makan berikut :

“...gara-gara harga BBM naik itu otomatis bikin jumlah pendapatan kita berkurang mas. Bayangkan BBM buat operasional sudah naik kalo pembelinya rame ndak pa pa mas, lha ini sepi gini”

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa naiknya turunnya perekonomian membuat beberapa usaha mengalami kebangkrutan dan menjadi salah satu faktor penyebab berkurangnya pendapatan asli daerah (PAD) yang mengakibatkan tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan.

2. Sosial

Kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak sangat berpengaruh peningkatan PAD. Besarnya pendapatan asli daerah bergantung dari berapa banyaknya wajib pajak. Pertumbuhan PAD

yang lebih rendah dari pendapatan daerah yang lain dapat dikarenakan kurangnya pendataan wajib pajak dan wajib pajak sendiri yang malas mendaftarkan usaha nya agar tidak terbebani pajak.

3. Geografis

Keadaan geografis Kabupaten Lombok barat dan wilayah Lombok pada umumnya yang telah mengalami gempa dahsyat pada tahun 2018 lalu sangat mempengaruhi kinerja BPKAD Kabupaten Lombok Barat dalam peningkatan PAD. Keterpurukan akibat gempa bumi yang terjadi menimpa wilayah Lombok sudah jelas terlihat pada penurunan PAD di tahun 2018 hingga kini, tidak hanya banyak memakan korban jiwa, namun membuat infrastruktur dan kegiatan pemerintahan di Lombok termasuk daerah Kabupaten Lombok Barat lumpuh total selama bencana berlangsung.

C. Kesimpulan

Kinerja BPKAD Kabupaten Lombok Barat dalam Peningkatan PAD dikatakan sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yakni Produktivitas, Kualitas Pelayanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas. Dalam melaksanakan kinerja, BPKAD Kabupaten Lombok Barat sangat memperhatikan bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjalankan tugas sesuai TUPOKSI masing-masing pegawai guna seoptimal mungkin meningkatkan PAD Lombok Barat.

Daftar Pustaka

Siregar,C.J.P., 2004, Farmasi Rumah Sakit, Penerbit Buku Kedokteran ECG,Jakarta.

Widjaja HAW. Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa. Jakarta:Rajawali Pers.2008

Nawawi, Hadari. (2006). Evaluasi dan manajemen kinerja di lingkungan perusahaan dan industri. Yogyakarta: Gadjah Mada Univercity Press.

M, Manulang. 1984. Management Personalia. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tohah, Miftah. 2008. Prilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta. Raja Grafindo Media.

Mardiasmo. 2002. Otonomi Daerah. Salemba Empat: Jakarta

Elmi, Bachrul. 2002, Keuangan Pemerintah Daerah Otonom Di Indonesia. Jakarta: UI Press.

Kumorotomo, Wahyudi. 2002 Etika Administrasi Negara.PT. Raja Grafindo. Jakarta.

Yusuf, M. 2010. Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik. Jakatra: Salemba Empat.

Arifin MHD Habibi. 2010. Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah). Pekanbaru

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.22 Tahun 1999
Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
tentang *Pemerintahan*
Daerah. Jakarta: Sekretariat
Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Peraturan